

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pemberian Referendum terhadap Timor Timur yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie merupakan suatu keputusan yang dilematis. Dimana satu sisi mendapat pertentangan dari dalam negeri dan di sisi lain membawa dampak positif di forum internasional. Referendum meskipun bukan menjadi faktor utama yang secara signifikan meningkatkan kredibilitas Indonesia secara langsung serta menempatkan Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Keputusan yang melatarbelakangi Habibie untuk memberikan referendum atas Timor Timur disamping adanya tekanan dunia internasional atas masalah HAM yang terjadi juga untuk mendapatkan kepercayaan dunia internasional sebagai bagian untuk bisa melepaskan diri dari krisis multi dimensi di Indonesia pada tahun 1998. Dampak dari keputusan itu dari secara eksternal mengangkat kepercayaan Internasional atas Indonesia dan Indonesia perlahan-lahan dapat lepas dari krisis yang terjadi dan menjadikan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM.

Penulis melihat tindakan Habibie dalam memberikan peluang referendum kepada Timor Timur disebabkan oleh tekanan-tekanan internasional khususnya dari Australia, dimana John Howard berhasil mempengaruhi Habibie dalam mengambil keputusan tersebut. Howard berhasil memadukan dua kebijakan pemerintahannya yang saling bertentangan dimana disatu sisi mendukung

kemerdekaan Timor Timur dan disaat yang sama berupaya menghindari perang dengan Indonesia. Kondisi Indonesia yang labil dikarenakan krisis multi dimensi waktu itu menghadapkan Habibie pada *rational choice* yang dalam keputusannya mengabaikan opini dalam negeri untuk mempertahankan Timor Timur. Habibie memandang dukungan dari dunia internasional lebih memiliki arti dalam melepaskan diri dari krisis ekonomi dengan mengembalikan kepercayaan internasional terhadap Indonesia, dengan tujuan untuk menarik investor asing untuk kembali ke Indonesia. Disini perbaikan ekonomi lebih di kedepankan untuk mengatasi krisis finansial Indonesia.

Habibie melihat besarnya beban negara dalam memberikan alokasi dana untuk Timor Timur sangat besar. Negara menanggung 93% APBD Timor Timur dimana hal ini jauh berbeda dengan bantuan pemerintah pusat untuk provinsi lainnya. Alokasi dana dari pusat tersebut diperuntukkan untuk membangun provinsi ke-27 tersebut yang seluas 14.609 km<sup>2</sup>. Pemerintah pusat mengucurkan dana pembangunan daerah dan dana sektoral yang masing-masing berjumlah 350,7 miliar dan Rp 602,4 miliar untuk mendorong kemajuan di Timor Timur. Dari dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur jalan, sampai pembangunan infrastruktur rumah sakit. Ketika Timor Timur akan melakukan referendum, pemerintah pusat masih mengeluarkan alokasi APBN sebesar Rp 187,3 Miliar untuk pembangunan provinsi, kota, desa, dan jaringan pengaman sosial, serta untuk menanggulangi kemiskinan. Hal inilah yang menjadikan Timor Timur banyak menguras pengeluaran negara.

Menurut Devania Annesya dalam jurnal Masalah Timor Timur dan Politik Luar Negeri RI,<sup>1</sup> dimana terjadinya gejolak internal yang terjadi di Indonesia berpengaruh besar terhadap arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang pada saat itu ditandai dengan krisis ekonomi. Kasus Timor Timur sendiri , terlihat sebagai upaya internasionalisasi konflik domestik yang berujung pada pengokohan intervensi asing untuk memisahkan wilayah konflik dari Indonesia. Sehingga politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk menjaga persatuan bangsa dan stabilitas nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Devania Annesya, 2010. "*Masalah Timor Timur dan Politik Luar Negeri RI*" dalam Jurnal Phobia, diperoleh dari <http://frenndw.wordpress.com/2010/01/13/masalah-timor-timur-danpolitik-luar-negeri-ri/> diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>2</sup> Ibid.